

Korelasi Keterbatasan Pendanaan Partai Politik terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia: Tinjauan Yuridis-Empiris

Mochammad Farhan¹ & Elan Jaelani²

^{1,2} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: farhansudra11@gmail.com¹, elanjaelani@gmail.com²

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-03-18

Revised : 2025-03-26

Accepted: 2025-03-28

KEYWORD

Funding Limitations, Political Parties, Quality of Democracy, Transparency, Accountability, Corruption.

KATA KUNCI

Keterbatasan Pendanaan, Partai Politik, Kualitas Demokrasi, Transparansi, Akuntabilitas, Korupsi.

ABSTRACT

This research examines the impact of limited political party funding on the quality of democracy in Indonesia through a juridical-empirical approach. Data is collected from literature studies and party financial audit reports. The findings show that funding limitations worsen the quality of regeneration, political participation, and party financial transparency and accountability. Policy recommendations include the need for more transparent state funding and an independent audit system to strengthen electoral democracy in Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak keterbatasan pendanaan partai politik terhadap kualitas demokrasi di Indonesia melalui pendekatan yuridis-empiris. Data dikumpulkan dari studi literatur dan laporan audit keuangan partai. Temuan menunjukkan bahwa keterbatasan dana memperburuk kualitas kaderisasi, partisipasi politik, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan partai. Rekomendasi kebijakan mencakup perlunya pendanaan negara yang lebih transparan dan sistem audit independen untuk memperkuat demokrasi elektoral di Indonesia.

1. Pendahuluan

Indonesia, sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, terus berupaya memperkuat kualitas demokrasinya melalui partisipasi politik aktif dan transparansi institusional. Partai politik memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama dalam menjembatani aspirasi masyarakat dan mendukung stabilitas pemerintahan melalui penyelenggaraan pemilu yang kredibel. Namun, partai politik di Indonesia sering menghadapi keterbatasan pendanaan yang signifikan, yang pada gilirannya berdampak pada kemampuan mereka dalam menjalankan peran tersebut. Keterbatasan dana ini membuat partai harus bergantung pada kontribusi pihak ketiga, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi independensi dalam menentukan arah kebijakan. Sebagai contoh, biaya operasional partai politik di Indonesia dapat mencapai Rp150-Rp250 miliar per tahun, yang menjadikan banyak

partai sulit untuk beroperasi secara mandiri dan transparan.

Keterbatasan pendanaan tidak hanya memengaruhi aspek operasional partai, tetapi juga berdampak pada kualitas kandidat yang dapat mereka ajukan untuk mengikuti pemilihan umum hal ini sejalan dengan data Berdasarkan data dari Kompas dan Formappi, terdapat peningkatan persentase calon legislatif (caleg) berlatar belakang pengusaha. Pada Pemilu 2014, jumlah caleg dari kalangan pengusaha tercatat sebesar 49,1%, sedangkan pada Pemilu 2019 angkanya meningkat menjadi 62%. Ketika dana terbatas, partai politik cenderung lebih selektif dalam memilih kandidat, dan pertimbangan politik praktis sering kali mengalahkan penilaian kualitas kandidat. Hal ini menciptakan tantangan dalam menghadirkan wakil-wakil yang berintegritas dan kompeten, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Situasi ini berimplikasi pada rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik

dan sistem politik secara keseluruhan, memperlemah keterlibatan masyarakat dalam proses politik, dan bahkan menurunkan partisipasi pemilih dalam pemilu.

Terdapat beberapa teori yang berkorelasi dengan penelitian seperti teori sistem politik dari Robert A. Dahl menyoroti pentingnya pola hubungan yang stabil antara individu dalam sistem politik yang melibatkan kekuasaan, aturan, dan kewenangan. Jika partai politik tidak memiliki dana yang cukup, hubungan kekuasaan dalam masyarakat dapat terganggu karena partai tidak dapat menjalankan fungsinya dengan efektif. Di sisi lain, Teori Partisipasi Politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik adalah indikator kualitas demokrasi yang utama. Partai yang tidak memiliki sumber daya memadai akan kesulitan menyosialisasikan program kepada masyarakat, yang berakibat pada rendahnya partisipasi politik dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Terlihat dari indeks demokrasi yang diterbitkan tahun 2022 oleh EIU (The Economist Intelligence Unit) bahwa Indonesia memiliki skor 6,71 dapat dikatakan cacat (*flawed democracy*) menduduki peringkat 52 dunia.

Permasalahan pendanaan juga membuat partai rentan terhadap praktik korupsi, karena kebutuhan finansial yang besar mendorong mereka mencari sumber pendanaan dari berbagai pihak dengan kepentingan tertentu sebagaimana yang dikatakan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, tingginya biaya politik di Indonesia menjadi salah satu penyebab utama perilaku koruptif di kalangan elite partai. Data menunjukkan bahwa hingga Agustus 2022, terdapat 310 anggota DPR dan DPRD serta 154 walikota/bupati yang terjerat kasus korupsi, banyak di antaranya berasal dari proses politik yang dikelola oleh partai politik. Ketergantungan ini mempengaruhi kualitas demokrasi, sebab partai yang terjebak dalam jaringan elit ekonomi cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat luas dan lebih fokus pada pemenuhan kepentingan pihak-pihak tertentu yang mendukung finansial mereka. Selain itu, keterbatasan dana mendorong partai untuk mengambil langkah-langkah pragmatis yang dapat mengurangi independensi dan integritas kebijakan politik.

Juga diperkuat dengan adanya penelitian terdahulu oleh Faisal, Bariroh Barid, dan Didik Mulyanto berjudul "Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi" tahun 2018 yang memfokuskan

pada pencarian pola pendanaan yang ideal untuk mencegah praktik korupsi dalam partai politik di Indonesia. Penelitian ini mengangkat konsep pendanaan partai politik melalui pajak dari warga negara atau alokasi dana negara melalui APBN/APBD. Pandangan ini didasarkan pada pemikiran bahwa partai politik adalah institusi vital bagi demokrasi yang perlu didukung untuk menjalankan fungsinya secara independen dan berintegritas.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan partai politik pada pendanaan dari pihak ketiga, yang sering kali menimbulkan konflik kepentingan dan meningkatkan risiko korupsi karena seringkali di temukan kasus aliran dana partai politik dari pihak ke tiga seperti kasus korupsi proyek PLTU Mulut Tambang Riau-1 pada tahun 2018 yang menyeret pengurus Partai Golkar, juga kasus lain Proyek Hambalang yang menyeret salah satu mantan Ketua Umum Partai Demokrat pada yang digunakan untuk membiayai kongres kemenangan sebagai ketua umum pada tahun 2010. Dengan adanya dukungan dana dari negara, partai politik diharapkan dapat melaksanakan tugas politik tanpa perlu khawatir akan kekurangan dana dan tanpa tergoda untuk mencari sumber pendanaan alternatif yang dapat merusak integritasnya. Studi ini memberikan pandangan bahwa pendanaan negara dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat demokrasi melalui partai politik yang lebih akuntabel dan bebas dari kepentingan kelompok atau elit tertentu.

Dampak dari keterbatasan dana ini tidak hanya terlihat pada proses internal partai, tetapi juga dalam keterlibatan masyarakat dalam pemilu. Partai dengan dana terbatas sering kali kesulitan menjangkau seluruh masyarakat secara efektif, khususnya dalam melakukan kampanye yang melibatkan kelompok masyarakat di daerah terpencil atau miskin. Hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan dalam representasi politik dan berkurangnya kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pemilu. Masyarakat yang merasa tidak terjangkau oleh partai politik akan cenderung kurang aktif dalam politik, yang pada akhirnya melemahkan demokrasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, muncul pertanyaan utama yang menjadi rumusan masalah: bagaimana keterbatasan dana yang dimiliki partai politik memengaruhi pelaksanaan program-program yang berdampak pada masyarakat, kualitas kandidat yang diajukan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, serta kerentanan partai terhadap praktik korupsi?

Secara keseluruhan, penelitian ini akan menganalisis bagaimana keterbatasan pendanaan partai politik di Indonesia memengaruhi kemampuan partai dalam menjalankan program yang berdampak pada masyarakat, menentukan kualitas kandidat, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pemilu, dan mengurangi potensi praktik korupsi. Dengan adanya research gap yang menyoroti hubungan antara masalah pendanaan partai politik dan kualitas demokrasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembahasan akademik serta memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung perbaikan sistem pendanaan partai politik di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) sebagaimana menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial atau pengalaman tertentu. Pendekatan ini menekankan pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan analisis yang mendalam terhadap konteks sosial dan budaya di mana fenomena tersebut terjadi. Penelitian ini mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber primer, seperti buku, artikel, jurnal, laporan, dan dokumen yang relevan dengan tema penelitian, yaitu keterbatasan pendanaan partai politik dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Analisis dilakukan dengan cara mendalami berbagai literatur yang berkaitan dengan teori-teori partai politik, pendanaan politik, dan kualitas demokrasi, serta mengkaji data terkait yang dapat memberikan wawasan mengenai peran pendanaan dalam memperkuat atau melemahkan demokrasi di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pengaruh Keterbatasan Dana terhadap Program Partai

Keterbatasan dana memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan partai politik dalam merancang dan mengimplementasikan program-program yang efektif. Banyak partai di Indonesia menghadapi kendala finansial yang membatasi ruang gerak mereka dalam menjalankan program secara optimal seperti salah satu masalah utama adalah keterlambatan dalam penyaluran dana bantuan keuangan. Sebagai contoh, Partai Demokrat mengungkapkan bahwa mereka sering kali harus menggunakan dana talangan untuk

memenuhi kebutuhan operasional sebelum dana bantuan dari pemerintah cair, yang biasanya baru diterima pada bulan Mei atau Juni. Kondisi ini sering kali menyebabkan partai hanya mampu menjalankan kegiatan-kegiatan sederhana yang tidak selalu sejalan dengan visi strategis jangka panjang. Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, partai harus mengambil langkah-langkah pragmatis yang bisa dilaksanakan meski tidak ideal.

Dalam kondisi keterbatasan dana, partai politik cenderung mengadopsi program-program yang lebih populis dan pragmatis untuk tetap menarik perhatian masyarakat. Program-program ini biasanya bersifat jangka pendek dan mudah dieksekusi, seperti workshop singkat atau seminar satu hari. Contohnya, Partai Golkar di Kabupaten Bolaang Mongondow hanya mampu melaksanakan workshop pendidikan politik satu hari meskipun dalam rencana awal terdapat kegiatan lain seperti seminar, lokakarya, dan dialog interaktif. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa kekurangan dana sering kali mengarahkan partai untuk mengambil langkah yang lebih realistis dengan fokus pada kegiatan yang dapat dilakukan dengan biaya minimal.

Keterbatasan dana juga menghambat efektivitas implementasi program yang telah direncanakan. Banyak kegiatan yang tidak dapat terlaksana sepenuhnya sesuai dengan perencanaan awal karena keterbatasan anggaran yang ada. Kendala utama yang dihadapi adalah ketidakmampuan untuk mendanai seluruh kegiatan strategis yang diperlukan untuk pendidikan politik, rekrutmen kader, dan kegiatan partisipatif lainnya. Beberapa partai bahkan harus mengandalkan dana pribadi atau dana fraksi guna menutupi kekurangan anggaran dalam melaksanakan program-program penting. Ketergantungan pada dana pribadi ini mencerminkan betapa terbatasnya kemampuan partai dalam menjalankan agenda politik mereka.

Selain itu, keterbatasan dana juga berdampak pada kemampuan partai untuk berinovasi dalam pengembangan program. Dengan dana yang terbatas, partai sering kali hanya menjalankan program-program konvensional yang tidak selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Sebagai contoh, kegiatan Karaktedes, yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan kader tentang strategi pemenangan pemilu, tidak dapat terlaksana karena kurangnya anggaran. Salah satu faktor utama yang menghambat inovasi adalah keterbatasan anggaran. Menurut laporan dari Kementerian Dalam Negeri, saat ini Indonesia hanya mengalokasikan sekitar 0,24% dari Produk

Domestik Bruto (PDB) untuk kegiatan inovasi, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang mencapai 3,4%. Keterbatasan ini membuat partai tidak mampu berinovasi dalam merespons tantangan politik yang dinamis dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Dampak dari keterbatasan dana ini memaksa partai untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran dan sumber daya yang ada. Di sisi lain, keterbatasan dana juga mendorong partai untuk mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk dari pihak eksternal. Namun, ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal ini dapat mempengaruhi independensi partai, terutama dalam pengambilan keputusan politik. Keberlanjutan pendanaan dari pihak ketiga bisa menjadi masalah serius jika donor memiliki kepentingan tertentu yang tidak sejalan dengan misi partai.

Keterbatasan anggaran juga berdampak pada kualitas program yang dapat dijalankan oleh partai. Program yang dibiayai dengan anggaran minimal sering kali kurang optimal dalam pelaksanaan dan pencapaiannya. Kualitas program yang rendah ini dapat memengaruhi citra partai di mata masyarakat dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap komitmen partai dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Ketika masyarakat melihat program yang dilaksanakan tidak memberikan manfaat yang signifikan, kepercayaan mereka pada partai politik akan menurun.

Dampak keterbatasan dana pada partai politik ini tidak hanya terbatas pada aspek internal, tetapi juga memiliki dampak langsung pada kualitas demokrasi secara keseluruhan. Partai politik yang tidak memiliki kapasitas finansial yang cukup sulit untuk berfungsi sebagai saluran aspirasi masyarakat yang efektif. Kondisi ini memengaruhi kemampuan partai dalam menjalankan tugasnya untuk mendidik politik dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Sehingga dapat dikatakan, keterbatasan dana memiliki dampak negatif terhadap kualitas, implementasi, dan inovasi program partai politik di Indonesia. Partai yang terhambat dalam melaksanakan program-programnya tidak mampu berperan optimal sebagai agen demokrasi dan pembaharu sosial. Dengan demikian, keterbatasan pendanaan partai dapat menjadi salah satu faktor yang menurunkan kualitas demokrasi, karena partai politik yang lemah akan sulit mendukung aspirasi dan kepentingan masyarakat secara efektif.

b. Dampak terhadap Kualitas Kandidat

Keterbatasan pendanaan partai politik di Indonesia memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kualitas kandidat yang dihasilkan. Dalam sistem politik yang seharusnya melibatkan berbagai partai dengan kandidat-kandidat yang berkualitas, pendanaan memainkan peran yang sangat vital. Terbatasnya dana sering kali berimplikasi pada rekrutmen kader, pelatihan dan pengembangan kader, serta pengaruh terhadap etika dan integritas dalam proses pencalonan. Hal ini perlu dianalisis dalam tiga aspek utama: rekrutmen kader, pelatihan dan pengembangan, serta etika dan integritas kandidat.

Pertama, rekrutmen kader merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menentukan kualitas kandidat yang akan diusung oleh partai politik. Dalam kondisi di mana pendanaan terbatas, partai politik sering kali lebih memilih kandidat yang memiliki kemampuan finansial untuk mendanai kampanye mereka. Hal ini memunculkan praktik pragmatisme dalam rekrutmen, di mana kandidat yang memiliki kekuatan finansial dianggap lebih unggul, meskipun kualitas dan kompetensi mereka kurang memadai. Sebagai akibatnya, partai sering kali mengabaikan kandidat yang memiliki kapasitas intelektual dan pengalaman politik yang mumpuni, karena mereka tidak dapat membiayai kampanye mereka sendiri.

Fenomena ini menciptakan sebuah oligarki dalam partai, di mana hanya mereka yang memiliki modal yang besar yang dapat mengakses posisi-posisi penting dalam struktur partai. Kandidat yang berasal dari keluarga kaya atau memiliki koneksi bisnis yang kuat lebih mungkin terpilih, sementara kandidat dari kalangan kurang mampu atau yang tidak memiliki dukungan finansial yang besar terpinggirkan. Dengan demikian, kualitas kandidat yang dihasilkan tidak lagi ditentukan oleh kemampuan atau visi mereka, melainkan oleh kemampuan mereka dalam mengumpulkan dana untuk kampanye.

Keterbatasan dana juga menyebabkan kualitas kader yang dipilih oleh partai semakin menurun. Ketika partai tidak mampu mengembangkan kader dari dalam, mereka terpaksa merekrut kandidat dari luar yang mungkin tidak memiliki keterikatan ideologis yang kuat dengan partai tersebut. Hal ini mengarah pada pengambilan keputusan yang didasarkan pada faktor-faktor eksternal, seperti popularitas atau kekuatan finansial, daripada pada kecocokan ideologis dan pemahaman terhadap visi partai. Fenomena ini memperburuk kualitas kandidat yang diusung, karena mereka mungkin

tidak sepenuhnya memahami misi dan tujuan partai, yang penting untuk membawa perubahan yang diinginkan.

Selanjutnya, keterbatasan pendanaan juga berpengaruh besar terhadap kemampuan partai dalam menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi kadernya. Program pelatihan yang memadai sangat penting untuk membekali kader dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi dinamika politik yang semakin kompleks. Namun, dengan anggaran yang terbatas, banyak partai politik tidak mampu mengadakan pelatihan yang cukup untuk meningkatkan kualitas kader mereka. Ini dapat berakibat pada ketidakmampuan kader dalam menghadapi tantangan politik yang ada, serta kurangnya pemahaman mengenai strategi kampanye yang efektif.

Tanpa pelatihan yang memadai, kader partai menjadi kurang siap untuk bersaing dalam pemilihan umum. Mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana merancang strategi kampanye yang efektif atau bagaimana menjangkau pemilih secara optimal. Akibatnya, kualitas kandidat yang diusung menjadi sangat terpengaruh, dan ini akan berdampak langsung pada hasil pemilu dan citra partai di mata publik. Jika partai tidak dapat menghasilkan kader yang terlatih dengan baik, maka kualitas demokrasi itu sendiri akan terdegradasi, karena pemilih akan melihat partai sebagai entitas yang tidak serius dalam menyiapkan calon-calon pemimpinnya.

Selain itu, ketidakmampuan untuk menyediakan pelatihan yang memadai juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik. Pemilih mungkin merasa bahwa partai tidak serius dalam memilih dan mengembangkan calon-calon yang berkualitas, yang dapat menyebabkan berkurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperburuk legitimasi demokrasi di Indonesia, karena pemilih merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh pada pemilihan kandidat yang kurang kompeten.

Ketiga, keterbatasan pendanaan juga mempengaruhi etika dan integritas dalam dunia politik. Dalam upaya untuk mengumpulkan dana guna mendanai kampanye, beberapa kandidat terpaksa terlibat dalam praktik politik uang. Politik uang adalah salah satu bentuk manipulasi yang merusak integritas proses pemilihan umum, karena keputusan politik lebih dipengaruhi oleh kekuatan finansial daripada aspirasi politik yang sebenarnya. Dalam konteks ini, keterbatasan dana

dapat mendorong kandidat untuk menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mengumpulkan dana, seperti menerima sumbangan dari sumber yang meragukan atau terlibat dalam praktek korupsi.

Partai politik yang tidak memiliki dana yang cukup seringkali mengandalkan sumber dana yang berasal dari donor yang memiliki kepentingan pribadi. Hal ini dapat menciptakan ketergantungan yang berbahaya, di mana kebijakan yang diambil oleh partai lebih menguntungkan pihak-pihak yang memiliki dana besar, bukan untuk kepentingan rakyat. Dalam hal ini, etika politik sangat terancam, karena banyak keputusan politik yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan finansial, bukan oleh kepentingan masyarakat secara umum.

Untuk itu, sangat penting bagi partai politik untuk menerapkan kebijakan transparansi yang ketat dalam pengelolaan dana mereka. Transparansi dalam penggunaan dana kampanye harus menjadi prioritas utama, untuk memastikan bahwa seluruh proses politik berjalan dengan bersih dan adil. Selain itu, partai perlu mengembangkan sistem pengawasan internal yang kuat, agar praktik-praktik politik uang dan korupsi dapat dicegah sejak dini.

Dalam rangka menjaga etika dan integritas dalam rekrutmen dan pencalonan kader, partai politik juga perlu mengedepankan pendidikan politik yang baik bagi kader mereka. Pelatihan mengenai etika politik harus menjadi bagian integral dari proses pendidikan kader, sehingga mereka dapat menjalankan tugas politik mereka dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya integritas dalam dunia politik. Tanpa pendidikan semacam ini, sangat mungkin partai akan menghasilkan kandidat yang tidak hanya kurang terlatih, tetapi juga rentan terhadap godaan politik uang dan korupsi.

Secara keseluruhan, keterbatasan pendanaan partai politik di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas kandidat yang dihasilkan. Ketidakmampuan partai untuk membiayai kampanye mereka dengan dana yang cukup, serta kurangnya pelatihan dan pengembangan kader, berpotensi menurunkan kualitas demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk melakukan reformasi dalam sistem pendanaan partai politik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Dengan cara ini, diharapkan partai dapat menghasilkan kandidat yang lebih berkualitas, yang tidak hanya kompeten tetapi juga memiliki integritas yang tinggi, sehingga dapat memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia secara keseluruhan.

c. Implikasi terhadap Partisipasi Masyarakat

Keterbatasan pendanaan partai politik di Indonesia memberikan dampak pula yang besar terhadap partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek yang terpengaruh, yakni mobilisasi pemilih, partisipasi aktif, dan kepercayaan publik. Dampak ini memiliki implikasi luas bagi kualitas demokrasi, terutama dalam menciptakan iklim politik yang sehat dan partisipatif.

Keterbatasan dana sering kali menjadi tantangan besar bagi partai politik dalam memobilisasi pemilih. Dalam keadaan seperti ini, partai harus lebih kreatif dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Salah satu strategi yang biasa dilakukan adalah dengan memanfaatkan jaringan sosial yang ada di komunitas-komunitas lokal untuk menjangkau pemilih tanpa perlu mengeluarkan biaya besar. Keberadaan media sosial juga menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan pesan politik, meskipun hal ini terkadang mengurangi kualitas kampanye yang dapat dilakukan oleh partai.

Keterbatasan dana sering kali mengarah pada penggunaan cara-cara yang lebih terfokus pada biaya rendah, seperti mengandalkan sukarelawan atau kampanye berbasis relawan. Walau demikian, mobilisasi pemilih melalui media sosial dan jaringan lokal ini memerlukan keterampilan dalam mengelola hubungan dengan pemilih agar dapat menciptakan dampak yang signifikan. Meskipun lebih efisien secara biaya, pendekatan ini sering kali kurang mampu mencapai seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang tidak aktif di dunia maya.

Selain itu, untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan keterlibatan, partai politik sering berkolaborasi dengan kelompok sosial, seperti organisasi masyarakat sipil, asosiasi lokal, atau kelompok agama. Dengan melibatkan aktor-aktor lokal ini, partai dapat meningkatkan kredibilitas dan memperluas basis pemilihnya. Ini juga berfungsi untuk membangun kepercayaan di kalangan masyarakat yang merasa lebih dekat dengan kelompok-kelompok tersebut, serta menciptakan solidaritas sosial yang lebih kuat dalam kampanye politik.

Namun demikian, meskipun pendekatan berbasis komunitas ini dapat efektif dalam mengatasi keterbatasan pendanaan, ada potensi bahwa partai dapat lebih memilih untuk menjangkau pemilih yang sudah memiliki preferensi politik tertentu. Hal ini berpotensi mengarah pada pengabaian kelompok masyarakat

yang tidak terjangkau atau yang memiliki pandangan politik berbeda, yang pada akhirnya mengurangi keragaman dalam partisipasi politik.

Keterbatasan dana juga memengaruhi partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan partai politik. Kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti seminar, lokakarya pendidikan politik, atau diskusi publik, sangat bergantung pada pendanaan yang memadai. Tanpa adanya dana yang cukup, partai kesulitan untuk menyelenggarakan acara yang dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Ini berdampak pada pengurangan partisipasi aktif yang sangat penting dalam memperkuat demokrasi.

Partai politik perlu mencari alternatif pendanaan untuk mengatasi hal ini. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan memanfaatkan sumber dana lain, seperti donasi kecil dari masyarakat, atau menggandeng sektor swasta dan masyarakat sipil yang peduli pada pendidikan politik. Dengan demikian, partai dapat memastikan bahwa masyarakat tetap terlibat dalam proses-proses politik yang lebih substansial.

Meskipun demikian, tanpa adanya sumber dana yang cukup, kegiatan partai yang bersifat pendidikan politik atau pemberdayaan masyarakat sering kali terbatas, dan ini berpotensi mengurangi kesadaran politik masyarakat yang lebih luas. Kurangnya kegiatan tersebut membuat masyarakat lebih sedikit terlibat dalam diskusi politik yang lebih mendalam, yang pada akhirnya menghambat proses demokratisasi.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, partai politik perlu mendorong lebih banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Mengadakan forum publik yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan atau kritik terhadap kebijakan partai dapat menjadi langkah positif dalam meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap partai tersebut. Dengan cara ini, partisipasi aktif dapat terjaga meskipun pendanaan terbatas.

Kepercayaan publik terhadap partai politik sering kali dipengaruhi oleh bagaimana mereka mengelola keterbatasan pendanaan yang ada. Ketidaktransparanan dalam penggunaan dana kampanye atau penerimaan sumbangan yang tidak jelas dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai. Hal ini lebih berbahaya karena masyarakat mungkin akan mulai meragukan integritas partai, terutama ketika melihat adanya potensi penyalahgunaan dana atau praktik korupsi.

Keterbatasan dana juga bisa meningkatkan risiko bagi partai untuk terlibat dalam praktik

politik uang. Dalam situasi yang penuh tekanan, di mana pendanaan terbatas, beberapa kandidat dapat tergoda untuk mengumpulkan dana dengan cara-cara yang tidak sah atau mengarah pada praktik korupsi. Tindakan semacam ini dapat memperburuk citra partai di mata masyarakat, karena akan menurunkan kualitas pemilu dan memperburuk ketidakpercayaan terhadap sistem politik secara keseluruhan.

Untuk memitigasi hal ini, partai politik harus lebih transparan dalam pengelolaan dana kampanye mereka. Menyediakan laporan keuangan yang terbuka kepada publik dan melakukan audit independen akan membantu meningkatkan akuntabilitas partai dan menunjukkan komitmen terhadap integritas politik. Transparansi seperti ini akan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan demokrasi secara umum.

Selain itu, untuk menjaga kepercayaan publik, partai perlu menunjukkan bahwa mereka benar-benar berkomitmen terhadap pengelolaan sumber daya secara bijaksana. Menghindari pengeluaran yang tidak efisien dan lebih memfokuskan dana pada program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat dapat menunjukkan bahwa partai tersebut serius dalam menjalankan misi politiknya, bukan hanya mengejar kekuasaan.

Kepercayaan publik juga dapat diperkuat dengan memperlihatkan bahwa partai politik menghargai partisipasi masyarakat dalam setiap tahap proses politik. Mengajak masyarakat untuk berperan dalam menyusun kebijakan atau memberikan masukan yang konstruktif pada pemilu dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap keadilan dalam sistem politik.

d. Hubungan dengan Transparansi dan Akuntabilitas

Keterbatasan pendanaan partai politik di Indonesia berpengaruh besar terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai. Aspek ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa partai politik dapat beroperasi secara efektif dan menjaga kepercayaan publik. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel dalam hal pendanaan akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam sub-bab ini, akan dibahas tiga aspek utama yang memengaruhi transparansi dan akuntabilitas partai politik, yakni pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban, dan konflik kepentingan.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan partai politik masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Beberapa partai politik tidak sepenuhnya transparan dalam hal ini, meskipun ada regulasi

yang mengharuskan pelaporan keuangan secara berkala. Realitas yang ada di lapangan menunjukkan bahwa banyak partai politik yang enggan menjalani audit secara menyeluruh, yang pada akhirnya menciptakan kesan bahwa pengelolaan dana partai tidak dilakukan dengan akuntabel dan terbuka. Hal ini tentunya mengurangi kepercayaan publik terhadap cara partai politik mengelola dana yang mereka terima.

Meskipun telah ada regulasi yang mewajibkan partai politik untuk melaporkan penggunaan dana mereka, banyak yang belum sepenuhnya transparan dalam mengungkapkan aliran dana tersebut. Hal ini berisiko menciptakan ketidakjelasan dalam penggunaan dana yang dapat mengarah pada penyelewengan atau penggelapan dana. Selain itu, jika partai politik tidak terbuka dalam pelaporan keuangan, masyarakat akan meragukan integritas partai tersebut dan menciptakan keraguan dalam proses politik secara keseluruhan.

Salah satu faktor utama yang menghambat transparansi dalam pengelolaan dana partai politik adalah ketiadaan mekanisme pengawasan yang efektif. Meskipun ada peraturan yang mengatur tentang laporan keuangan, implementasinya sering kali lemah. Hal ini menyulitkan pihak berwenang untuk memantau penggunaan dana secara mendalam dan memastikan bahwa dana yang diterima digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan misi partai politik. Pengawasan yang tidak efektif ini juga memicu kecurigaan dan ketidakpercayaan di kalangan publik.

Akuntabilitas partai politik kepada publik sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap partai dan proses politik secara keseluruhan. Partai politik diwajibkan untuk melaporkan penggunaan dana kampanye secara berkala. Namun, laporan-laporan yang diberikan tidak selalu mencerminkan realitas penggunaan dana yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap integritas dan akuntabilitas partai politik.

Partai politik memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada publik mengenai penggunaan dana yang mereka terima, baik itu untuk kegiatan kampanye, operasional partai, maupun program-program yang dijalankan. Tanpa pertanggungjawaban yang jelas, partai politik akan kesulitan membangun kepercayaan di kalangan pemilih. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk memiliki sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, partai politik perlu memiliki saluran yang efektif untuk

menerima masukan dan kritik dari masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengawasan dan dapat memberikan masukan mengenai penggunaan dana yang lebih tepat sasaran. Saluran komunikasi yang terbuka akan memastikan bahwa keputusan politik yang diambil mencerminkan kepentingan publik dan bukan hanya kepentingan elit politik atau pemodal tertentu.

Pencegahan konflik kepentingan dalam pengelolaan dana partai merupakan hal yang krusial untuk menjaga integritas partai. Konflik kepentingan dapat muncul ketika pihak-pihak tertentu memiliki hubungan yang tidak jelas dalam pengelolaan dana partai, yang pada akhirnya dapat merugikan publik. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk memiliki kebijakan yang jelas dan ketat untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap partai.

Partai politik harus memiliki aturan yang jelas mengenai siapa saja yang boleh memberikan sumbangan kepada partai, serta bagaimana sumbangan tersebut digunakan. Aturan ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengeksploitasi kontribusi finansial mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk mempengaruhi kebijakan partai. Selain itu, pencegahan konflik kepentingan harus dilakukan dengan cara yang transparan dan terukur, termasuk dengan melakukan audit keuangan secara rutin.

Partai politik harus berkomitmen untuk menjaga integritas dalam pengelolaan keuangannya. Ini melibatkan penerapan standar akuntabilitas yang tinggi dan penggunaan dana yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan dengan sebaik-baiknya, partai perlu melakukan audit independen terhadap laporan keuangan mereka. Audit ini harus dilakukan secara transparan dan hasilnya perlu diumumkan kepada publik.

Audit independen memainkan peran penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan partai politik sesuai dengan standar yang berlaku. Audit ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui apakah dana partai digunakan dengan cara yang akuntabel dan efisien. Hasil audit independen yang terbuka akan membantu meningkatkan kredibilitas partai di mata publik dan mengurangi risiko penyelewengan dana.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana partai politik. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengawasan melalui berbagai

saluran, seperti lembaga pengawas independen, organisasi masyarakat sipil, dan media. Keterlibatan aktif masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas partai politik dan mendorong partai untuk lebih transparan dalam pengelolaan dana mereka.

Keterbatasan pendanaan yang dialami oleh banyak partai politik di Indonesia menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pendanaan. Sistem pendanaan yang lebih transparan dan adil akan memungkinkan partai politik untuk mengelola sumber daya mereka dengan lebih baik. Reformasi ini juga harus mencakup peningkatan pengawasan oleh lembaga terkait dan masyarakat, untuk memastikan bahwa dana yang diterima partai digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan partai.

Pengawasan oleh lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), perlu diperkuat untuk memastikan bahwa partai politik mematuhi peraturan terkait pengelolaan dana. Lembaga-lembaga ini harus diberikan wewenang yang cukup untuk mengawasi penggunaan dana partai secara menyeluruh dan memberikan sanksi yang tegas jika ditemukan penyimpangan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan pendanaan partai politik di Indonesia memiliki dampak yang cukup besar terhadap kualitas demokrasi. Partai politik yang menghadapi keterbatasan dana cenderung kesulitan dalam merancang dan melaksanakan program-program yang berdampak luas bagi masyarakat, karena terbatasnya sumber daya yang tersedia. Hal ini mengarah pada pemilihan program yang lebih pragmatis dan populis, yang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan jangka panjang negara atau masyarakat. Keterbatasan dana juga memengaruhi kualitas kandidat yang diajukan oleh partai, di mana pertimbangan praktis seringkali mengalahkan kualitas dan integritas calon legislatif.

Lebih lanjut, keterbatasan pendanaan juga memperburuk partisipasi politik masyarakat. Partai politik yang kekurangan dana seringkali kesulitan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemilu dan melemahnya legitimasi demokrasi itu sendiri. Selain itu, ketergantungan pada pendanaan eksternal memperburuk independensi partai politik dan meningkatkan risiko terjadinya praktik korupsi, yang akhirnya

menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi politik.

Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan adanya reformasi dalam sistem pendanaan partai politik di Indonesia, termasuk kemungkinan pendanaan yang lebih transparan dan berbasis negara, guna mengurangi ketergantungan pada sumber eksternal yang dapat merusak integritas politik. Pendanaan yang adil dan transparan akan memperkuat demokrasi dengan memberikan ruang bagi partai politik untuk beroperasi secara lebih independen dan bertanggung jawab, serta menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan partisipatif.

5. Daftar Pustaka

- Ady. (2016). Masalah keuangan parpol harus dibenahi menyeluruh. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/>
- Andriansyah, A. (2022). Pengamat: Biaya politik tinggi picu kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/>
- Arfiani, A., & Syofyan, S. (2023). Menakar transparansi keuangan partai politik pada pelaksanaan pemilihan umum. *Nagari Law Review*, 7(1), 107–116.
- Astuti, N. F. (2024). BSKDN Kemendagri beberkan hambatan inovasi daerah dari keterbatasan anggaran hingga budaya organisasi. *BKSDN*. <https://bskdn.kemendagri.go.id/>
- Darmoko, H. W. (2022). Mengungkap makna akuntabilitas dan audit atas laporan dana kampanye parpol: Bukti dari pemilu legislatif 2019 Indonesia. *JAMER: Jurnal Akuntansi Merdeka*, 3(2), 121–127.
- Diki, K. (2022). *Analisis kegagalan fungsi kaderisasi dan rekrutmen partai politik pada fenomena calon tunggal di Pilkada Pasaman tahun 2020* [Skripsi, Universitas Andalas].
- Faisal, F., Barid, B., & Mulyanto, D. (2018). Pendanaan partai politik di Indonesia: Mencari pola pendanaan ideal untuk mencegah korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(1), 265–287.
- Ismail, B. (2010). *Strategi partai politik dalam memobilisasi dukungan pemilih* [Tesis, Universitas Gadjah Mada].
- Lawing, K. (2023). Analisis kenaikan bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Kutai Barat. *Journal of Geopolitics and Public Policy*, 1(1), 10–25. <http://journal.epistemikpress.id/>
- LEMHANAS. (2022). *Analisis Indeks Geo V*.
- Lestari, N. P., Djohan, D., & Nurdin, I. (2022). Implementasi kebijakan penggunaan bantuan keuangan partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 4640–4665. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/>
- Nastitie, D. P. (2023). Demi politik naik kelas, akuntabilitas dana kampanye didesak. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/>
- Oktaryal, A., & Hastuti, P. (2021). Desain penegakan hukum korupsi partai politik di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 1–22. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.729>
- Pratama, M. R. (2024). Krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. *Kompasiana.com*. <https://www.kompasiana.com/>
- Radianto, E. (2023). Interpretasi modern tentang teori dan filosofis penelitian memilih metode penelitian yang tepat. *XXXII, 1*, 56–74.
- Retnasari, L. (2013). *Partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan Pilbup Banyumas 2013 di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas* [Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta].
- Rizki, M. J. (2022a). Menyoal peningkatan dana parpol antisipasi korupsi bidang politik. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/>
- Rizki, M. J. (2022b). Menyoroti ragam persoalan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan parpol. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/>
- Romadlon, S. G. (2016). Implikasi pergeseran sistem politik terhadap hukum dan birokrasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 868–885.
- Saryono, S., Fazria, A. N., Andini, S., & Hasan, H. (2022). Hubungan antara pemahaman etika politik dan kesadaran hukum dengan budaya politik organisasi mahasiswa. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 215–222.
- Siahaan, P. G., Purba, N. R., Natasya, M., Naibaho, C. R., & Manurung, N. O. B. (2024). Pengaruh tindakan money politic terhadap kualitas calon legislatif dalam membangun demokrasi yang sehat pada Pemilu tahun 2024 di Kelurahan Binjai, Medan Denai. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(1), 424–431. <https://doi.org/10.36805/civics.v9i1.7192>
- STARNAS PK. (2022). Menagih integritas parpol melalui bantuan keuangan partai politik. *Stranaspk.id*. <https://stranaspk.id/>

- Syawawi, R. (2016). Pengawasan dana politik. *Indonesia Corruption Watch (ICW)*. <https://www.antikorupsi.org/id/article/pengawasan-dana-politik>
- Tangkere, G. M., Liando, D. M., & Lengkong, J. P. (2021). Efektivitas penggunaan bantuan keuangan partai politik dalam pelaksanaan program pendidikan politik. *Jurnal Transdisiplin Pertanian*, 17(3), 995–1006.
- Theodora, A. P. A., & Agnes. (2018). Caleg pengusaha hadapi pragmatisme. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/09/29/caleg-pengusaha-hadapi-pragmatisme>
- Yofiansyah, M. A. F., & Sari, R. P. (2024). Analisis tingkat kepatuhan partai politik dari hasil audit pelaporan keuangan dana kampanye peserta pemilu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(2), 701–707.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).